

**ANALISIS PERBANDINGAN TATA KELOLA SYARIAH PADA BANK
UMUM SYARIAH DENGAN UNIT USAHA SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia dan Bank BPD DIY Syariah)**

Hui Aminu Rabih

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

E-mail: huiaminurabih@mail.ugm.ac.id

INTISARI

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan perbandingan tata kelola syariah serta koordinasi antara fungsi tata kelola syariah dengan fungsi tata kelola pada umumnya dalam BUS dan UUS di Indonesia.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara semi-terstruktur dan data sekunder berupa peninjauan dokumen yang relevan. Objek pada penelitian ini adalah BSI dan Bank BPD DIY Syariah.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI dan Bank BPD DIY Syariah telah dilengkapi dan menjalankan fungsi-fungsi syariah sebagaimana diatur dalam POJK No.2 Tahun 2024. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam menerapkan tata kelola syariah yang baik dan efektif, seperti tantangan dalam pelaksanaan manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal. Selain itu, perbedaan bentuk kelembagaan yang diterapkan oleh BSI dan Bank BPD DIY Syariah berdampak terhadap perbedaan penerapan tata kelola syariah dari segi posisi dan pendekatan fungsi syariah serta perbedaan pada koordinasi antara fungsi tata kelola syariah dengan fungsi tata kelola pada umumnya.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini terbatas pada analisis penerapan dan perbandingan tata kelola syariah pada BSI dan Bank BPD DIY Syariah serta menganalisis koordinasi yang terjadi antara fungsi tata kelola syariah dengan fungsi tata kelola pada umumnya dalam tata kelola syariah pada bank syariah.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya mengenai penerapan tata kelola syariah pada BUS dan UUS di Indonesia yang masih terbatas dan didukung dengan diterbitkannya peraturan terbaru, yaitu POJK No.2 Tahun 2024. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah, fungsi kepatuhan syariah, fungsi audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal.

Kata kunci – *Tata kelola syariah, manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal.*

COMPARATIVE ANALYSIS OF SHARIA GOVERNANCE IN ISLAMIC COMMERCIAL BANK AND SHARIA BUSINESS UNIT (CASE STUDY OF BANK SYARIAH INDONESIA AND BANK BPD DIY SYARIAH)

ABSTRACT

Objectives – This study aims to analyze the implementation and comparison of sharia governance, as well as the coordination between the sharia governance function and general governance functions in Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Business Units (UUS) in Indonesia.

Research Methods – This study employed a qualitative method with a case study approach. Primary data were collected through semi-structured interviews and secondary data were collected through a review of relevant documents. The objects of this study were BSI and Bank BPD DIY Syariah.

Findings – The results of the study indicate that BSI and Bank BPD DIY Syariah have established and implemented sharia functions in accordance with POJK No.2 Year 2024. However, several challenges persist in achieving effective sharia governance, particularly in the implementation of sharia risk management, internal sharia audit, and external review.. In addition, the differences in institutional structures adopted by BSI and Bank BPD DIY Syariah affect the implementation of sharia governance in terms of the position and approach of the sharia function, as well as differences in coordination between the sharia governance function and governance functions in general.

Limitations/Implications - This study is limited to analyzing the implementation and comparison of sharia governance at BSI and Bank BPD DIY Syariah, as well as analyzing the coordination between the sharia governance function and the general governance function within the sharia governance framework of Islamic banks.

Originality – This study addresses the research gap in previous research regarding the implementation of sharia governance in BUS and UUS in Indonesia, which is still limited and supported by the issuance of the latest regulation, POJK No. 2 Year 2024. This research focuses on examining the implementation of sharia risk management functions, sharia compliance functions, sharia internal audit functions, and external reviews.

Keywords – *Sharia governance, sharia risk management, sharia compliance, internal sharia audit, and external review.*